

VI. PEMENUHAN ATAS PANGAN, GIZI DAN KESEHATAN SEBAGAI HAK ASASI UNTUK KELANGSUNGAN HIDUP MANUSIA

Clara M.Kusharto¹ dan Nurdin²

¹Dosen Gizi Masyarakat, FEMA, IPB

²Mahasiswa Program Doktor Gizi Masyarakat, SPS-IPB (Dosen Kimia
FKIP Universitas Tadulako Palu)

I. LATAR BELAKANG

Hak atas pangan diakui secara formal oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Sebagai hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum internasional, yaitu hak untuk mempunyai akses teratur, tetap dan tidak terhalang. Apakah itu secara langsung atau dengan cara pembelian finansial, atas kecukupan dan kelayakan pangan secara kuantitatif dan kualitatif yang berhubungan dengan tradisi kultural dimana konsumen itu berada, dan memastikan hidup, fisik dan mental, individu dan kolektif, yang memenuhi dan bermartabat yang bebas dari keprihatinan. Untuk itu Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas pangan. Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1996 tentang pangan mengamatkan pemenuhan atas pangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh negara dan masyarakat dalam konteks pembangunan ketahanan pangan.

Ketahanan pangan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintahan daerah, provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar (PP No 38, tahun 2007). Pemenuhan ketahanan pangan bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi seimbang dan merata baik di tingkat nasional, daerah hingga rumahtangga sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal (DKP, 2006).

Dengan demikian, pemerintah berperan dalam menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat (Baliwati, 2007). Dalam konteks tersebut maka pemenuhan pangan dilaksanakan berdasarkan pendekatan hak atas pangan atau "rights based", yaitu pemerintah wajib menghormati, melindungi, memfasilitasi dan menyediakan kebutuhan pangan. Menurut FAO (2006) pendekatan hak dalam pembangunan ketahanan mengandung makna bahwa :1). pemerintah tidak boleh menghilangkan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup. 2). pemerintah harus melindungi masyarakat dari keadaan kehilangan akses tersebut dan 3). pada masyarakat yang tidak tercukupi kebutuhannya, maka pemerintah harus proaktif menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mandiri; apabila masyarakat belum mampu melakukannya, maka pemerintah harus menjamin ketersediaan pangannya

Namun demikian, kelaparan dan gizi buruk yang kronis masih saja dialami oleh jutaan orang hingga mereka yang hidup terbelakang dan mengalami kematian dini. Lebih dari 815 juta orang masih menderita kelaparan dan gizi buruk yang kronis. Sekitar 35 juta orang meninggal setiap tahunnya sebagai akibat langsung dan tidak langsung dari kelaparan. Kelaparan membuat hidup menjadi terbelakang dalam kemiskinan, yang terjadi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam Kompas, Rabu 3 Oktober, 2007 terpetik berita berjudul "Kemiskinan: Suatu Lingkaran Setan Dusun Sidowayah" Dusun tersebut berada di Desa Sidoharjo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Diberitakan bahwa suatu keluarga dan 100-an warga di dusun tersebut karena kemiskinan yang mendera, membuat anak-anaknya mengalami kurang gizi sehingga menderita keterlambatan mental dan kecerdasannya rendah (idiot). Karena kemiskinan warga dusun tersebut tak pernah memikirkan masalah kesehatan. Mereka tidak pernah mengonsumsi garam beryodium, sehingga mereka banyak mengalami gondok, kerdil, idiot, hingga lumpuh.

Pangan merupakan kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup manusia. Oleh karenanya pangan diakui sebagai hak asasi manusia. Pemenuhan hak asasi atas pangan dan gizi, amat utama karena hak-hak asasi yang lain tidak mungkin bisa terjamin tanpa lebih dulu

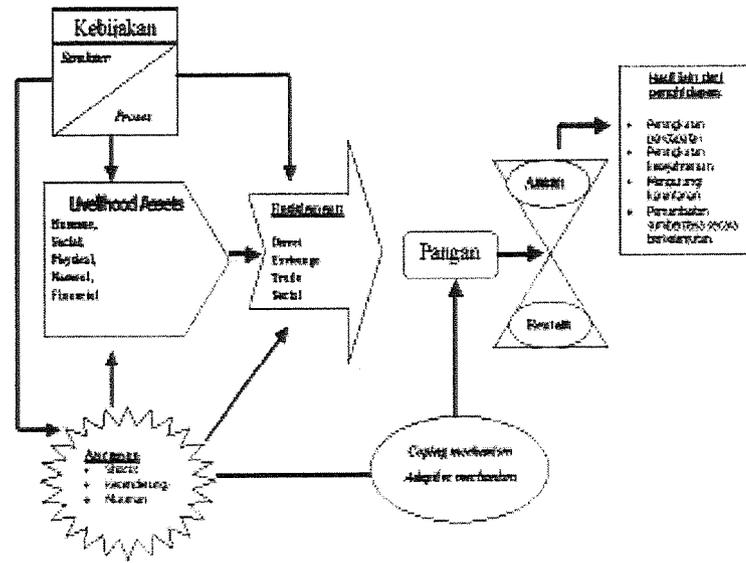
menjamin hak atas pangan dan gizi. Sejalan dengan itu, Undang-Undang (UU) No 7 tahun 1996 tentang Pangan dengan tegas menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi "hak asasi" setiap rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional (Witoto, 2007).

Meskipun telah ada komitmen dan program untuk mengurangi angka kelaparan, namun persoalan kelaparan masih merupakan tantangan besar. Sebagian besar penduduk kelaparan itu tinggal di negara-negara sedang berkembang, yakni 815 juta orang. Sekitar 75 persen dari mereka yang lapar adalah penduduk pedesaan. Laporan FAO tahun 2005, bahkan mengungkap fakta tragis tentang kelaparan dan kurang gizi yang menewaskan hampir 6 juta anak-anak setiap tahunnya. Peta Kerawanan Pangan Indonesia tahun 2005 menunjukkan adanya 100 kabupaten rawan pangan dari 265 kabupaten di Indonesia. SUSENAS 2003 mencatat adanya sekitar 5,1 juta (27,5%) anak balita yang kekurangan gizi. Departemen Kesehatan mencatat adanya 2,5 juta (40,1%) ibu hamil dan 4 juta (26,4%) perempuan usia subur yang menderita anemia. Kenyataan yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk kelaparan justru meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah (PP) No. 68/2002 tentang Ketahanan Pangan telah menyatakan bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumber daya pangan lokal dan menghindarkan ketergantungan pada pangan impor. Undang-Undang No.7, tahun 1996 tentang Pangan juga menyatakan bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggungjawab mewujudkan ketahanan pangan. Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Desa mempunyai otonomi untuk melaksanakan kebijakan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing (Witoto, 2007).

II. SISTEM PANGAN DALAM KERANGKA *SUSTAINABLE LIVELIHOOD*

Masalah pangan dan pertanian disebabkan oleh berbagai aspek yang saling terkait dan mempengaruhi. Penyebab kurang pangan disebabkan antara lain karena penduduk tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber produksi pangan seperti tanah, air, input pertanian, modal, dan teknologi. Di negara-negara sedang berkembang, penyebab utama rawan pangan adalah lemahnya akses terhadap lahan untuk memproduksi pangan. Berbagai kasus lain menunjukkan bahwa kurang pangan dan kemiskinan juga disebabkan oleh kebijakan perdagangan internasional dan nasional serta berbagai bencana alam dan sosial seperti kekeringan, banjir, perang, atau krisis ekonomi.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memahami masalah pangan dan kemiskinan secara menyeluruh dan terpadu adalah dengan menggunakan kerangka kerja *sustainable livelihood*, dan konsep *entitlement*. Seperti semua kerangka kerja lainnya, bentuk ini merupakan penyederhanaan atas keragaman dan kekayaan mengenai kehidupan. Dalam bentuk paling sederhana, kerangka kerja ini menggambarkan manusia (individu maupun kelompok) merupakan penggerak berbagai aset dan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi berbagai masalah dan ancaman.



Gambar 5. Kerangka kerja *sustainable livelihood* (Witoro, 2003)

Manusia dalam hal ini memiliki akses terhadap berbagai aset produktif yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup lainnya. Chambers dan Conway mendefinisikan penghidupan berkelanjutan sebagai: "suatu penghidupan yang meliputi kemampuan atau kecakapan, aset-aset (simpanan, sumberdaya, claims dan akses) dan kegiatan yang dibutuhkan untuk sarana untuk hidup: suatu penghidupan dikatakan berkelanjutan jika dapat mengatasi dan memperbaiki diri dari tekanan dan bencana, menjaga atau meningkatkan kecakapan dan aset-aset, dan menyediakan penghidupan berkelanjutan untuk generasi berikutnya; dan yang memberi sumbangan terhadap penghidupan-penghidupan lain pada tingkat lokal dan global dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Chambers and Conway 1992).

Ada lima sumber kehidupan yang dimiliki oleh setiap individu atau unit sosial yang lebih tinggi di dalam upayanya mengembangkan kehidupannya yaitu:

(i) *human capital*, yakni modal yang dimiliki berupa keterampilan, pengetahuan, tenaga kerja, dan kesehatan; (ii) *social capital*, adalah kekayaan sosial yang dimiliki masyarakat seperti jaringan, keanggotaan dari kelompok-kelompok, hubungan berdasarkan kepercayaan, pertukaran hak yang mendorong untuk berkoperasi dan juga mengurangi biaya-biaya transaksi serta menjadi dasar dari sistem jaringan pengaman sosial yang informal; (iii) *natural capital* adalah persediaan sumber daya alam seperti tanah, hutan, air, kualitas udara, perlindungan terhadap erosi, keanekaragaman hayati, dan lainnya; (iv) *physical capital* adalah infrastruktur dasar jalan, saluran irigasi, sarana komunikasi, sanitasi dan persediaan air yang memadai, akses terhadap komunikasi, dan sebagainya; (v) *financial capital*, adalah sumber-sumber keuangan yang digunakan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan kehidupannya seperti uang tunai, persediaan dan peredaran uang reguler.

Hubungan individu atau unit sosial yang lebih tinggi terhadap pangan dalam studi ini didasarkan pada konsep *entitlement* atau hak terhadap pangan. Dalam konsep ini, memproduksi dan mendapatkan pangan bagi manusia adalah hak asasi. Dalam konsep *entitlement* ada beberapa cara manusia dalam mengakses pangan yaitu:

(i) *direct entitlement*, yakni hak atas pangan yang diperoleh melalui hubungan hubungan di dalam kegiatan proses produksi pangan; (ii) *exchange entitlement*, yakni hak dan akses atas pangan yang diperoleh melalui hubungan tukar menukar jasa atau keahlian; (iii) *trade entitlement*, yakni hak atas pangan yang diperoleh melalui hubungan jual beli komoditi yang diproduksi sendiri; dan (iv) *social entitlement*, yakni hak dan akses terhadap pangan yang diperoleh melalui pertukaran sosial di antara anggota komunitas sosial. Sistem pangan individu, keluarga atau masyarakat yang lebih luas bukanlah sesuatu yang statis tetapi dinamis. Dinamika ini antara lain dipengaruhi oleh tingkat kerentanan (*vulnerability*) dan kemampuan individu atau unit sosial yang lebih besar dalam menghadapi perubahan. Penyebab

kerentanan adalah *shock* yaitu perubahan mendadak dan tidak terduga (karena alam, ekonomi, konflik, dan lainnya).

Seasonality atau musiman yang dapat diperkirakan dengan hampir pasti, seperti perubahan secara musiman dari harga, produksi, dan iklim. Setiap individu dan unit sosial yang lebih besar mengembangkan sistem penyesuaian diri dalam merespon perubahan tersebut (*shocks, trends, dan seasonality*). Respons itu bersifat jangka pendek yang disebut *coping mechanism* atau yang lebih jangka panjang yang disebut *adaptive mechanism*. Mekanisme dalam menghadapi perubahan dalam jangka pendek terutama bertujuan untuk mengakses pangan (*entitlement*), sedangkan jangka panjang bertujuan untuk memperkuat sumber-sumber kehidupannya (*livelihood assets*). Ketidakmampuan menyesuaikan diri dalam jangka pendek akan membawa ke kondisi rawan pangan. Penyesuaian rawan pangan yang tidak memperhitungkan aspek penguatan sumber-sumber kehidupan dalam jangka panjang justru tidak akan menjamin keberlanjutan ketahanan pangan individu maupun unit sosial yang lebih tinggi.

Situasi dan kondisi individu, keluarga, masyarakat maupun unit sosial yang lebih tinggi terkait dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dari luar. Sistem pangan sangat dipengaruhi oleh struktur (institusi dan tingkatannya) dan proses (kebijakan) di dalam sistem tersebut.

III. KEDAULATAN PANGAN SEBAGAI PARADIGMA BARU UNTUK MENGATASI KELAPARAN

Persoalan kelaparan yang dihadapi rakyat Indonesia saat ini juga tidak dapat dilepaskan dari proses liberalisasi perdagangan dunia. Liberalisasi perdagangan telah memungkinkan sejumlah kecil perusahaan multi nasional dan negara-negara maju untuk memainkan peran yang dominan dalam menentukan arah dan kebijakan pangan global. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang semakin berkuasa dalam mengatur tidak hanya sistem perdagangan, tetapi banyak aspek kehidupan manusia lainnya. Terkait dengan pangan, liberalisasi perdagangan mengubah fungsi pangan yang multi dimensi menjadi sekadar komoditas perdagangan. Bahkan WTO mengartikan ketahanan pangan sebagai "ketersediaan pangan di pasar". Konsep ini dalam

praktiknya memaksa rakyat di negara-negara sedang berkembang untuk memenuhi pangan yang akan dipenuhi oleh negara-negara maju melalui mekanisme pasar bebas. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pangan telah menjadi bagian dari skema besar liberalisasi perdagangan.

Sebagaimana negara-negara sedang berkembang lainnya, saat ini Indonesia telah terikat oleh kesepakatan pangan dan pertanian di tingkat internasional. Kondisi ekonomi dan politik dalam negeri yang ada menyebabkan posisi tawar Indonesia lemah terhadap pihak luar. Kuatnya tekanan dari luar dan lemahnya posisi tawar Indonesia menyebabkan Indonesia menerapkan kebijakan liberalisasi perdagangan pangan. Liberalisasi ini diwujudkan antara lain dalam pencabutan subsidi untuk petani, privatisasi badan usaha logistik dan penurunan tarif impor produk pangan.

Kebijakan pangan nasional dengan demikian tidak disusun secara komprehensif dalam suatu *grand strategy* serta mengabaikan potensi dan kemampuan rakyat dalam mengelola sistem pangan mereka secara mandiri. Selain itu, berbagai praktik korupsi dan kekerasan pada tingkat nasional hingga lokal serta tidak adanya perangkat hukum untuk melindungi hak-hak rakyat atas pangan juga semakin memperlemah upaya untuk mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan. Di sisi lain, ada upaya internasional untuk mengatasi kelaparan seperti tercermin dalam *World Food Summit* tahun 1974 dan 1996. Para pemimpin dunia yang hadir dalam WFS tahun 1996 kembali mendeklarasikan bersama untuk "mencapai ketahanan pangan bagi setiap orang dan melanjutkan upaya untuk menghilangkan kelaparan di seluruh negara". Ketahanan pangan dalam hal ini diartikan sebagai kondisi tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang setiap saat untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Namun kenyataan menunjukkan bahwa situasi pangan dunia lima tahun setelah Konferensi Pangan Dunia tahun 1996 terlihat tidak menunjukkan perkembangan sesuai yang diharapkan. Hal itu dinyatakan oleh Sekjen Perserikatan Bangsa- Bangsa, Kofi Annan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Pangan Setelah Lima Tahun Kemudian di Roma, 10-13 Juni 2002. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada tahun 2002, sebanyak 815 juta manusia di negara berkembang masih menghadapi kelaparan, 300 juta di antaranya adalah anak-anak. Mereka bergulat melawan rasa

lapar dan menghadapi serangan berbagai penyakit akibat kurang gizi bahkan ancaman kematian. Tiap hari kurang-lebih 24.000 orang meninggal karena lapar atau hal-hal yang berkenaan dengan kelaparan. Tiga perempat jumlah kematian itu adalah anak-anak berumur dibawah lima tahun. Data-data FAO kian mengejutkan karena satu dari tiap lima penduduk dunia menderita kekurangan gizi. Sekitar 777 juta orang mengalami kelangkaan pangan, yang tinggal selangkah lagi masuk kategori menderita kelaparan (Kompas, 17 Juni 2002).

Penyebab besarnya jumlah orang lapar di dunia dan juga penduduk miskin ini dengan tegas disebutkan Diouf karena pasar global untuk komoditas pertanian masih saja belum adil. Dari tahun 1999 sampai 2000, menurut Diouf bantuan berkonsesi dari negara maju dan pinjaman dari lembaga keuangan internasional turun 50 persen yang pertanian yang merupakan gantungan hidup 70 persen masyarakat miskin dunia. Oleh karena kurangnya komitmen tersebut, jumlah orang yang kekurangan makan hanya berkurang enam juta orang per tahun dari target 22 juta orang seperti yang dideklarasikan tahun 1996. Dengan kecepatan pengurangan yang berjalan lambat itu, maka target 400 juta orang miskin dan lapar bisa diperbaiki kesejahteraannya, baru akan tercapai 45 tahun lagi. (Kompas 17 Juni 2002).

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa upaya internasional dan nasional untuk mengatasi kelaparan dengan konsep ketahanan pangan berbasis liberalisasi perdagangan tidak akan pernah mampu mengatasi akar masalah kelaparan. Oleh karenanya harus ada perubahan mendasar terhadap kebijakan dan strategi yang dikembangkan selama ini. Konsep atau paradigma baru yang dibutuhkan, menempatkan hak rakyat atas pangan yang berperspektif gender. Konsep ini memungkinkan petani perempuan dan laki-laki berperan aktif dan produktif dalam menciptakan sistem pertanian berkelanjutan berdasarkan pada sumberdaya dan kearifan lokal tanpa diskriminasi, diatas kepentingan perdagangan.

Berangkat dari keprihatinan tersebut, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, mengusulkan konsep Kedaulatan Pangan yang sesuai dengan situasi ekologis, sosial, dan budaya rakyat Indonesia. Konsep ini menjadi payung untuk menyusun aksi dan strategi berbasis gerakan rakyat yang diperlukan untuk mengakhiri kelaparan. Kedaulatan

pangan adalah hak setiap orang, kelompok masyarakat dan negara untuk mengakses dan mengontrol berbagai sumberdaya produktif serta dapat menentukan sendiri kebijakan produksi, distribusi dan konsumsi pangannya sesuai dengan kondisi ekologis, sosial, ekonomi dan budaya khas masing-masing. Konsep ini berbeda dengan konsep ketahanan pangan yang tidak mempedulikan dari mana pangan diproduksi dan hak rakyat atas sumberdaya produktif. Dalam konsep kedaulatan pangan, hak rakyat tidak terbatas pada akses untuk memperoleh pangan tetapi juga hak untuk memproduksi dan mendistribusikan pangan.

Agar kedaulatan rakyat atas pangan dapat terwujud, maka harus dilakukan reformasi kebijakan global yang menjamin hak asasi atas pangan kepada seluruh manusia. Reformasi ini juga mencakup perwujudan perdagangan yang adil dan pro rakyat serta menghentikan kebijakan dumping untuk menghindari penguasaan pangan satu negara atas negara yang lain. Kebijakan global harus memberikan proteksi terhadap pasar lokal dan melindungi kedaulatan semua orang, komunitas dan negara untuk menentukan sistem produksi, distribusi dan konsumsi pangannya sendiri yang sesuai dengan karakter ekonomi, sosial, budaya dan ekologi masing-masing.

Pada tingkat nasional dan lokal, diperlukan sebuah kebijakan untuk melindungi pangan domestik dari tekanan liberalisasi perdagangan. Pelibatan dan partisipasi rakyat dalam penentuan kebijakan pangan nasional merupakan prasyarat penting untuk mewujudkannya. Pemerintah pada tingkat pusat dan daerah harus membuka peluang bagi komunitas lokal, desa dan kabupaten untuk merancang dan mengembangkan sistem pangannya sendiri yang sesuai dengan karakter ekonomi, sosial dan budaya lokal. Pembangunan pangan harus diarahkan pada pembangunan pedesaan yang komprehensif berbasis pada pertanian berkelanjutan sesuai dengan budaya dan kearifan lokal. Mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia, maka untuk mewujudkannya diperlukan keterlibatan rakyat dalam penentuan kebijakan terkait dengan proses produksi, distribusi dan konsumsi pangan. Kedaulatan pangan dengan demikian merupakan sesuatu yang patut diperjuangkan melalui gerakan rakyat. Gerakan rakyat untuk kedaulatan pangan dapat terjadi jika ada organisasi yang kuat dari berbagai elemen rakyat – baik perempuan

maupun laki-laki seperti petani, masyarakat adat, buruh, nelayan, dan masyarakat miskin kota.

Berbagai komponen rakyat ini secara sadar dan bahu-membahu membangun solidaritas dan kerjasama memperjuangkan terwujudnya kedaulatan pangan bagi setiap orang, komunitas maupun negara.

IV. SISTEM PANGAN DI PEDESAAN

Gagalnya sistem pangan nasional (swasembada pangan nasional) dan sistem pangan global (liberalisasi perdagangan dunia) tidak dapat menjamin terpenuhinya hak rakyat atas pangan secara berkelanjutan. Kesadaran ini kemudian mendorong beberapa kalangan untuk menengok kembali sistem pangan lokal yang telah berkembang jauh sebelumnya dan menjadi fondasi sistem pangan rakyat. Sejarah pertanian Indonesia sudah dimulai jauh sebelum penjajah datang. Sistem pertanian ladang dan sawah tersebut menjadi andalan rakyat untuk memenuhi kebutuhan pangan ini, meskipun ditelantarkan oleh hampir semua penguasa di Indonesia namun demikian masih terus bertahan sebagai upaya untuk mempertahankan hidup. Ratusan ribu komunitas yang tersebar di seluruh pelosok nusantara memiliki sistem pangannya masing-masing yang khas serta jenis tanaman pangan yang beragam yang dibudidayakan di ladang maupun di sawah. Setiap komunitas yang telah bertani menetap, mengembangkan sendiri sistem pengelolaan sumber-sumber agraria, inovasi dalam pembenihan dan teknik bercocok tanam, pengembangan infrastruktur, penyimpanan, distribusi atau perdagangan, maupun dalam mengolah pangannya.

Komunitas-komunitas di Indonesia telah mengembangkan berbagai makanan pokok seperti sagu, jagung, ketela pohon, dan ubi jalar. Berbagai jenis tanaman itu tumbuh dan tersedia sepanjang tahun di berbagai keadaan lahan dan musim. Sejak dulu secara turun-temurun masyarakat desa terbiasa memanfaatkan sumber-sumber pangan yang beragam itu sebagai basis pemenuhan kebutuhan pangan pokok sehari-hari maupun sebagai camilan. Keragaman pangan juga mengandung keragaman gizi, bahkan di antara tanaman pangan itu berkhasiat obat. Sistem pangan lokal inilah yang menjadi andalan

untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan dan mengatasi ancaman dari bahaya kelaparan atau krisis pangan.

Sedangkan bagi mereka yang mempunyai tanah luas, penghasilan utamanya berasal dari sawah (Martono dkk 2001). Penelitian Soemarwoto, di Kecamatan Cinangka dan Padarincang Jawa Barat, pekarangan ditumbuhi oleh 179 jenis tanaman yang mencakup tanaman tahunan dan tanaman setahun, yang ukurannya bermacam-macam, dari yang menjalar di tanah hingga pohon yang tingginya sekitar 25 meter. Selain itu, di dua kecamatan tersebut terdapat 62 jenis gulma. Selanjutnya, diketahui pula bahwa dari ke-62 jenis tersebut, 18 jenis digunakan untuk ramuan jamu obat, satu jenis untuk atap dan makanan ternak, empat jenis sebagai sayuran, dan hampir semua jenis rumput-rumputan untuk makanan ternak (Soemarwoto 1987).

Berbagai potensi yang terkandung dalam sistem pangan lokal inilah yang sangat mungkin dapat mengatasi persoalan pangan pada tingkat komunitas. *Community based food systems* memiliki peran penting dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan. *Community-based food system* menawarkan kepada rakyat suatu peluang di mana mereka dapat meningkatkan pendapatan, penghidupan mereka, dan kapasitas untuk memproduksi, dan secara mendasar suatu jalan lapang di mana mereka dapat menjamin ketahanan pangan mereka pada masa mendatang (FOUNDATION, 2002).

Saat ini, peluang untuk pengembangan sistem pangan lokal mendapatkan momen yang tepat seiring dengan kebijakan otonomi daerah yang bergulir sejak tahun 1999.

Kebijakan ini memberi harapan terhadap perubahan paradigma pembangunan yang sentralistis menjadi desentralistis dan demokratis. Wacana ini juga mencakup otonomi Desa Murni, dimana pemerintahan desa akan memainkan peran utama dalam proses pembangunan. Undang Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 menjelaskan bahwa desa tidak hanya penyelenggara administrasi negara di bawah kabupaten tetapi menjadi komunitas yang mandiri. Pemerintah pusat dan daerah tidak lagi akan campur tangan secara langsung, tetapi hanya sebagai fasilitator. UU itu mengakui bahwa otonomi adalah hak yang lahir dan tumbuh berkembang dari dalam masyarakat desa sendiri. Melalui

otonomi desa, pemerintah pusat akan mengembalikan hak yang di masa lampau dirampas oleh pemerintah di atasnya.

Otonomi desa dapat diartikan sebagai otonomi suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai wilayah sendiri yang berkembang menjadi satu kesatuan hukum dimana kepentingan bersama penduduk dilindungi dan dikembangkan menurut hukum adat dengan pemerintahan sendiri. Ciri dari masyarakat hukum adat atau desa yang otonom adalah berhak mengatur dan mengurus pemerintahan dan rumah tangganya sendiri, berhak mengangkat kepala daerahnya atau majelis pemerintahan sendiri, berhak mempunyai sumber keuangan sendiri, serta berhak atas berbagai sumberdaya mereka sendiri. Dengan demikian desa secara alami telah memiliki otonominya sendiri semenjak masyarakat hukum ini terbentuk sehingga otonomi desa bukan pemberian pihak lain.

Hal penting yang terkandung dalam otonomi desa adalah kewenangan dalam mengelola berbagai sumberdaya desa agar dapat memenuhi kebutuhan, memperoleh pendapatan dan memenuhi kebutuhan lainnya. Mengacu pada konsep sustainable livelihood, sumberdaya atau aset desa meliputi: sumberdaya alam (lahan pertanian, sungai, dan hutan), sumberdaya manusia (tenaga kerja, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya), sosial (organisasi, peraturan, jaringan, dan sebagainya), infrastruktur (jalan, saluran irigasi, pasar, dan sebagainya), keuangan (sumber dana, sistem pasar, dan sebagainya). Sumberdaya desa yang beranekaragam merupakan aset masyarakat desa yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan pangan, pendapatan dan lainnya. Di antara berbagai aset desa, aset sosial merupakan aset paling penting bagi berkembangnya otonomi desa.

Pemerintahan desa-desa tradisional membuktikan bahwa dengan menempatkan kerja gotong royong dan penggalangan dana swadaya, otonomi desa dapat dikembangkan. Prinsip utama otonomi desa adalah kewenangan membuat keputusan-keputusan sendiri melalui semangat keswadayaan yang telah lama dimiliki oleh desa, dalam satu kesatuan wilayah desa. Peran berbagai organisasi desa seperti Badan Perwakilan Desa, kelompok petani, kelompok perempuan, organisasi kampung, kelompok simpan pinjam, para pedagang dan sebagainya dalam proses pengambilan keputusan merupakan prasyarat penting. Pilihan tersebut

diambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan.

V. PRINSIP DAN STRATEGI IMPLEMENTASI SISTEM PANGAN DESA

Mengingat penduduk yang kurang pangan dan miskin tinggal di wilayah-wilayah pedesaan atau kawasan marginal, maka pilihan terbaiknya adalah peningkatan akses petani kecil terhadap sumberdaya produktif untuk meningkatkan produksi. Pertanian merupakan penyedia lapangan kerja, pangan dan pendapatan bagi penduduk pedesaan. Oleh karenanya sistem pangan lokal difokuskan untuk: (1) mengutamakan produksi pertanian desa untuk kebutuhan pangan penduduk desa bersangkutan, dan (2) memanfaatkan pertanian sebagai generator pengembangan ekonomi masyarakat.

Sistem pangan lokal berarti pemberian jaminan dan kewenangan dalam pengambilan keputusan pada tingkat lokal yang melibatkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan seperti petani dan masyarakat adat serta kelompok perempuan. Sistem ini harus dilakukan melalui penataan penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber produktif seperti tanah, air, benih, teknologi, input, permodalan, kelembagaan agar lebih adil, produktif dan berkelanjutan. Hal yang penting juga adalah dukungan terhadap hak petani kecil dan masyarakat adat untuk melanjutkan dan mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan mereka, praktek-praktek pengelolaan lingkungan, dan mata pencaharian mereka. Hal itu juga menyangkut praktek penyimpanan, pengembangan dan pertukaran benih tanaman pangan dan obat-obatan.

Lebih lanjut, sistem pangan lokal juga berarti pemberian wewenang kepada komunitas untuk melindungi, mengkonservasi dan memanfaatkan kawasan pertanian dan lingkungan lainnya untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan dan pendapatan mereka. Lokalisasi pangan juga mencakup perubahan dari ketergantungan terhadap input eksternal dan sistem budidaya monokultur menjadi kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan input dan keanekaragaman tanaman pangan yang dibudidayakan. Membangun sistem pangan lokal

juga berarti memperkuat basis bagi terwujudnya kedaulatan pangan pada tingkat daerah dan nasional.

Kedaulatan pangan komunitas lokal ini juga memberikan kebebasan kepada komunitas untuk menentukan sendiri skenario pangan kampung atau desanya sendiri atau tingkat yang lebih tinggi. Dalam skenario pangan kampung atau desa ini, mereka dapat menentukan jenis dan jumlah pangan yang akan diproduksi dan dikonsumsi serta diperdagangkan. Hal ini merupakan salah satu jawaban terhadap persoalan harga yang terjangkau bagi konsumen dan harga yang adil bagi petani, karena merupakan satu kesatuan yang menjadi kebijakan bersama tingkat lokal. Sistem ini juga berarti mengurangi biaya transportasi serta penghematan energi dan pengurangan pencemaran. Sistem pangan lokal dengan juga akan mendorong pengembangan perekonomian rakyat untuk mendukung kemandirian, produksi berbasis komunitas, inovasi rakyat, keberlanjutan lingkungan, dan pola hubungan yang saling menguntungkan.

VI. PEMENUHAN AKAN PANGAN, GIZI DAN KESEHATAN SEBAGAI HAK

Bila pemenuhan pangan sudah tercapai, maka diharapkan status kesehatan dan gizi juga akan terpenuhi. Kesehatan adalah investasi. *"Kesehatan adalah segala-galanya, tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti ; "Kesehatan yang membuat segala-galanya tampil beda".* Kesehatan menjadi mahal harganya, andaikan perilaku hidup sehat kita buruk dan tidak dimulai sejak dini. Menurut teori Blum, untuk berada dalam keadaan Sehat, ada 4 faktor utama yang mempengaruhinya yaitu: lingkungan (45%), pelayanan kesehatan (30%), gizi (20%), dan faktor genetik (hanya 5%).

SEHAT menurut McLaren (1976) adalah *"Physically, Socially dan Wellbeing"* yang harus diupayakan, dipertahankan, dan dioptimalkan. Kenali diri sendiri dulu, sebelum dikenali oleh orang lain, *be aware* dengan adanya *signal* yang ada bila terjadi perubahan-perubahan dalam tubuh. Mencegah lebih baik dari pada mengobati. Menurut Kusharto, Clara (2005) dalam papernya yang dipresentasikan dalam peringatan Hari Pangan Sedunia bahwa *"sungguh amat bijak mengajak*

semua untuk melaksanakan Budaya 3S yaitu Sehat bergizi Makanannya, Sehat Lingkungan Hidupnya dan Sehat Perilakunya"
Pertanyaannya Mengapa? Beban hidup bagi banyak orang semakin berat sehingga banyak orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar dan kelompok orang ini termasuk kedalam *kriteria miskin*. Kemiskinan dapat dihitung berdasarkan pengeluaran per orang yang setara dengan nilai kebutuhan kalori 1900-2300 Kal/orang/hari dan pengeluaran untuk non pangan (perumahan, pendidikan, pemeliharaan kesehatan dan transportasi).

Pangan sebagai komoditas yang menempati peringkat pertama dalam urutan kebutuhan hidup masyarakat, menghabiskan rata-rata 69% porsi pendapatan penduduk Indonesia. Krisis ekonomi mengakibatkan harga-harga barang meningkat, sehingga otomatis pengeluaran untuk pangan dan non-pangan juga meningkat karena didekati dari pengeluaran, tetapi secara riil pendapatan cenderung menurun. Hal ini dijelaskan dengan adanya alokasi pengeluaran pangan yang mengalami peningkatan dan sebaliknya pengeluaran non-pangan menurun, karena dengan meningkatnya harga barang baik pangan maupun non-pangan, maka masyarakat lebih memprioritaskan membeli bahan pangan dibandingkan bahan non pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- menghindari penyakit dengan makan makanan seimbang yang bergizi, murah harganya namun memenuhi 4 sehat 5 Sempurna
- Makan makanan yang mengandung sumber energi dan protein (nasi dan lauk pauk tak perlu yang mahal);
- Mengandung vitamin dan mineral (sayur dan buah)
- Ditambah dengan susu dan banyak minum air dan serat.
- Membudayakan kembali makanan tradisional yang umumnya telah memenuhi zat gizi yang cukup adalah cara bijak dalam memilih makanan sehat untuk dikonsumsi.

"Tell me what you eat, I will tell you who you are"(Atheline Brillt-Savarin)

- ❖ Gittleman : ajakan untuk Anda memahami pola makan (*Food pattern*) dan makanan pilihan (*Food Preferences*) anda, dengan

mencatat/merecord asupan total makanan dan minuman dalam spesifik waktu tertentu. Dalam "*food diary*", tidak hanya dicatat apa makanan yang dimakan, namun juga cara/metode penyiapannya. Mulailah dengan menjabarkan 4 W's dan 1 H dalam pencatatan makanan kita, dengan acuan sebagai berikut:

What you eat?

When you eat (time of a day)?

Why you eat (emotions)?

Where you eat (setting)?

How to eat ?

Apa yang sebaiknya dimakan?

- ❖ Makanan berserat tinggi seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, roti berserat dan sereal memiliki kandungan energi yang ringan dan banyak kandungan gizinya dan mengenyangkan. *Konsumsiilah dengan porsi yang lebih banyak!*
- ❖ Hindari makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi
- ❖ Makanan terbuat dari tepung seperti nasi, roti putih, mie dan kentang tidak terlalu menggemukkan dibandingkan makan berlemak dan yang digoreng, *Konsumsiilah dalam porsi yang lebih kecil, batasi penggunaan mentega atau digoreng.*
- ❖ Makanan yang dipanggang, rebus atau goreng dengan menggunakan minyak sedikit *lebih baik* dibandingkan dengan yang digoreng dengan banyak minyak. *Konsumsiilah dengan porsi yang lebih banyak.*

Dimana Anda Makan?

- ❖ Batasi makan hanya di meja makan atau di kantin kantor anda yang jelas diketahui tingkat kebersihannya.
- ❖ Hindari makan sambil menonton televisi (ngemil) atau ketika memasak.

Kapan seharusnya makan?

- ❖ Makanlah dengan teratur, dimulai dengan sarapan. Coba menjaga agar tidak melewati waktu makan.
- ❖ Hindari makanan kecil

Mengapa harus makan?. Tubuh memperoleh asupan gizi yang diperlukan untuk menjaga kebutuhan tubuh (pembentukan energi, tumbuh & berkembang dan untuk menjaga dan mengganti sel/jaringan yang aus/usang).

- Hindari makan karena bosan, stress atau basa-basi yang berlebihan.
- Perhatikan asupan gizi yang berimbang dengan pola aktivitas anda.

Bagaimana cara makan yang benar?

- ❖ Kunyahlah makanan dengan lambat dan nikmati gigitan demi gigitan
- ❖ Ambilah porsi yang lebih kecil

Menurut Gabriel Cousens, tentang makanan dalam "bukunya" *Conscious Eating.....: dinyatakan bahwa "Food is a Love Note from God":*

- Makanan, khususnya dari tumbuhan merupakan suatu kondensasi energi surya, bulan, sistem bintang, dan berbagai sumber lain di alam semesta.
- Tumbuh-tumbuhan menyerap pancaran radiasi benda-benda langit ke dalam sistem energi dan kemudian mengalihkannya ke dalam sistem tubuh manusia yang memakannya.
- Dalam istilah biologi ada transfer energi potensial disebutnya juga dalam sudut pandang spritual bahwa energi ini semata-mata merupakan *kondensasi energi kosmos sang Pencipta*.
- Dalam proses pencernaan, makanan melepaskan simpanan energinya agar dapat diserap tubuh. Diketahui pula bahwasanya makanan merupakan gudang informasi dan kimia tubuh.
- Sel-sel akan terus berkomunikasi informasi, melalui pengantar pesan " *neurotransmitter* dan sistem hormonal. Dan kini dalam

tumbuh-tumbuhan dikenal fitokimia, interaksinya dengan kimiawi tubuh dipercaya dapat meningkatkan atau sebaliknya malah mengganggu sistem pengantar pesan.

Back to nature approach, saat ini banyak dikemukakan dalam melakukan intervensi gizi, selain *technological approach* dan *social approach* dalam melakukan perbaikan keadaan gizi dan kesehatan, dan hal ini sejalan dengan pendapat dan prediksi seorang ilmuwan terkenal (Thomas Edison) berikut ini:

"The Doctor of the future will give no medicine, but will interest his patients in the care of the human frame, in diet and in the cause and prevention of disease" .

Seharusnya resiko ini dapat diperkecil dengan mengubah gaya hidup dengan :

- ❖ Berhentilah dari kebiasaan yang tidak baik seperti merokok, waktu tidur tidak teratur, malas berolahraga dan sebagainya
- ❖ Kendalikan stress, disiplin dalam bekerja.
- ❖ Ubah pola aktivitas, *Bgm??*

Kapan mau mulai?

Bagaimana anda memulai?

Berapa sering?

Berapa lama dan seberapa keras?.

Kapan Anda Mulai?

- ❖ Anda bisa memulai turun satu halte lebih awal dan berjalan selama sisa jarak ke tujuan.
- ❖ Cobalah menggunakan tangga dibandingkan menggunakan lift atau tangga berjalan.
- ❖ Berjalan apabila jaraknya dekat
- ❖ Dalam segala cara, gunakan lebih banyak otot
- ❖ Mulai mengikuti program aerobic.

Bagaimana anda memulainya?

- Pilihlah latihan yang anda sukai sesuai dengan tingkat kebugaran Anda
- Jika Anda belum pernah berlatih sebelumnya, mulailah dengan perlahan dan secara bertahap meningkatkannya, dalam jangka waktu 3-6/minggu

Berapa sering?

- untuk pengendalian berat badan dan kebugaran, anda perlu berolahraga 3-5 kali dalam seminggu

Berapa lama dan seberapa sering?

- Berlatihlah selama 15-60 menit setiap kali, sampai berkeringat dan bernafas cepat tanpa kehabisan nafas.
- Anda harus dapat berbicara atau bersiul; selama berlatih.

Pesan yang benar:

Pertambahan berat badan bukan karena kelebihan makan (an), namun karena asupan energi yang tidak berimbang dengan kalori yang dikeluarkan.

VII. RENCANA AKSI NASIONAL

Rencana aksi nasional yang berhubungan dengan pangan dan kesehatan adalah sebagai berikut (Abubakar, 2007):

- a. Pemenuhan Hak Atas Pangan adalah: (1) terlaksananya penurunan kejadian rawan pangan, busung lapar, dan gizi buruk, (2) terlaksananya penurunan angka kurang gizi pada balita menjadi 20%, dan (3) terlaksananya peningkatan kemandirian pangan di tingkat kabupaten/kota.

Fokusnya adalah perencanaan program ketahanan dan kemandirian pangan di setiap daerah.

- b. Pemenuhan Hak Atas Kesehatan adalah terlaksananya program-program di antaranya: (1) penyehatan lingkungan, (2)

pemasyarakatan perilaku hidup bersih, dan sehat (PHBS), (3) peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas, (4) perbaikan gizi masyarakat, (5) peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, serta (6) penanganan masalah darurat kesehatan.

Fokusnya adalah revitalisasi posyandu untuk penurunan angka IMR, MMR, TFR dan KKP.

VIII. KEPUSTAKAAN

- Abubakar HMS. 2007. Gizi dan Pembangunan Sumber Daya Manusia. Makalah *dalam* Seminar Kemitraan dalam Mengatasi Masalah Gizi di Indonesia. Jakarta.
- Baliwati Y.F. 2007. Pengarusutamaan Gender dan Ketahanan Pangan (Gender Mainstreaming and Food Security). Makalah Diskusi Kelompok. Lokakarya "Pengarusutamaan Gender Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Menuju Kualitas Kehidupan Berkelanjutan".. Bogor, 10 September, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan R.I-FEMA, IPB.
- Chambers, R. and G. Conway (1992) *Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21 st century*. IDS Discussion Paper 296. Brighton: IDS. (p..7-8).
- DKP. 2006. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009. Dewan Ketahanan Pangan. Jakarta.
- FAO. 2006. The Right To Food In Practice. Implementation at the Nation Level. Food and Agriculture Organization of the United Nation. Rome, (www. fao Org).
- FOUNDATION, 2002. Seeds of Hope: Feeding the World Through Community-Based on Food Systems, Salzburg Seminar, 398 pages.
- Kompas, Senin, 17 Juni 2002,, World Food Summit: "Five Years Later", Menghapus Kemiskinan adalah Melawan Ketidakadilan.

- Kusharto, Clara,. 2005. Budaya 3'S (Sehat Knsumsi, Sehat Lingkungan dan Sehat Perilaku. "Roundtable Discussion", Hari Pangan Sedunia. Keuskupan Bogor.
- McLaren DS.1976. Nutrition in The Community, a Text for Public Healthy Worker. John Wiley & Sons.London.
- Martono BFA, Setiana DD, dan Suryolaksono I. 2201. Pekarangan Rumah: Belajar dari Keanekaragaman Hayati Domestik sebagai Pengimbang Pertanian Monokultur, PICTS. Sen, A. 1981, Poverty and Famines, An Essay on Entitlement and Deprivation.
- Soemarwoto, O, et al.1987. Pekarangan Rumah di Jawa: Suatu Ekosistem Pertanian Terpadu, Ekofarming : Bertani Selaras Alam, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1987 *dalam* http://www.pbhi.or.id/content.php?id=137&id_tit=6.
- Witoto,2007.Kedaulatan Masyarakat Desa Atas Pangan *dalam* http://krkp.org/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=41.
- Witoto, 2003. Menemukan Kembali dan Memperkuat Sistem Pangan Lokal. Makalah Lokakarya Forum Pendamping Petani Regio Gedepahala, Kampung Pending, Sukabum, 2-4 September 2003.

Lampiran 7. Daftar nama dan alamat peserta

No.	Nama	Instansi	Alamat
1	Ali Khomsan, Prof.Dr.	Departemen Gizi Masyarakat - IPB	Kampus IPB Darmaga, Bogor
2	Andreas Santosa, Dr.	Mewakili Dekan Faperta	Kampus IPB Darmaga, Bogor
3	Aris Solikhah	Humas IPB	Kampus IPB Darmaga, Bogor
4	Atika WM, Ir.	Kompas	Jakarta
5	Bambang Pramudya, Prof. Dr.	LPPM - IPB	Kampus IPB Darmaga, Bogor
6	Betty SL. Jenie, Prof. Dr.	Departemen Ilmu Teknologi Pangan - IPB	Kampus IPB Darmaga, Bogor
7	Cesilia Meti Dwiriani, MS.	Departemen Gizi Masyarakat - IPB	Kampus IPB Darmaga, Bogor
8	Clara MK., Dr.	Departemen Gizi Masyarakat - IPB	Kampus IPB Darmaga, Bogor
9	Dahrul Syah, Dr.	Departemen Ilmu Teknologi Pangan - IPB	Kampus IPB Darmaga, Bogor
10	Darwin, MS.	Departemen Ilmu Teknologi Pangan - IPB	Bogor
11	Dase Hunaefi, MFood	Departemen Ilmu Teknologi Pangan - IPB	Bogor
12	Deddy Muchtadi, Prof. Dr.	Departemen Ilmu Teknologi Pangan - IPB	Kampus IPB Darmaga, Bogor
13	Dede R.A, Dr.	Departemen Ilmu Teknologi Pangan - IPB	Bogor
14	Didah NF., Msi.	Departemen Ilmu Teknologi Pangan - IPB	Bogor
15	Dodik Briawan, Dr.	Departemen Gizi Masyarakat - IPB	Kampus IPB Darmaga, Bogor
16	Eliza H.	Pasca Sarjana Gizi Manusia, Departemen Gizi Masyarakat, FEMA - IPB	Jakarta
17	Elvira Syamsir, MS.	Departemen Ilmu Teknologi Pangan - IPB	Bogor
18	Endang P., Dr.	SEAFast Center - IPB	Jl. Puspa No 1 Lingkar Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
19	Euis Sunarti, Dr.	Kepala Bagian Ilmu Keluarga, Departemen IKK, FEMA - IPB	Kampus IPB Darmaga, Bogor
20	Evy Damayanthi, Dr.	Departemen Gizi Masyarakat - IPB	Kampus IPB Darmaga, Bogor
21	Feri Kusnandar, Dr.	Departemen Ilmu Teknologi Pangan - IPB	Kampus IPB Darmaga, Bogor
22	Fitrah Ernawati, MSc.	Puslitbang Gizi dan Makanan	Jl. Semeru 63 Bogor
23	Fitrian D.	Agro Observer	Padjajaran No. 54
24	Fransisca, Dr.	Departemen Ilmu Teknologi Pangan - IPB	Kampus IPB Darmaga, Bogor
25	Handewi P. Saliem, Dr.	Pusat Analisis Sosek dan Kebijakan Pertanian	Jl. A. Yani 70 Bogor

Prosiding *Focus Group Discussion* Kenaikan Harga BBM dan Pencapaian MDGs

No.	Nama	Instansi	Alamat
26	Hanifah Nuryani Lioe, Dr.	Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan	Kampus IPB Darmaga PO BOX 220 Bogor
27	Harsi Kusumaningrum, Dr.	Departemen Ilmu Teknologi Pangan - IPB	Kampus IPB Darmaga, Bogor
28	Hemanto Siregar, Prof, Dr.	Institut Pertanian Bogor	Kantor WR SP Gedung AHN Kampus IPB Darmaga, Bogor
29	Hendry Noer F.	Food Review Indonesia	Jl. Wulung No. 11 Komplek Pakuan Lampiri
30	Herman Sudirman, Dr.	Puslitbang Gizi dan Makanan	Jl. Dr. Sumeru No. 63 Bogor 16112
31	Herwanto	Suara Pembaharuan	Bogor
32	Ikeu Tanziha, Dr.	Departemen Gizi Masyarakat - IPB	Kampus IPB Darmaga, Bogor
33	Iwan	RRI	
34	Lilis Nuraida, Dr.	SEAFast Center - IPB	Jl. Puspa No 1 Lingkar Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
35	Ls. Mirza	Pasca Sarjana Gizi Manusia, Departemen Gizi Masyarakat, FEMA - IPB	Bogor
36	Marudut	Pasca Sarjana Gizi Manusia, Departemen Gizi Masyarakat, FEMA	Jakarta
37	Mellova	Pasca Sarjana Gizi Manusia, Departemen Gizi Masyarakat, FEMA	Pasar Minggu, Jakarta
38	Melly Latifah, MS.	Kepala Bagian Departemen IKK, FEMA - IPB	Kampus IPB Darmaga Bogor
39	Nurdin, MS.	Departemen Gizi Masyarakat - IPB	Kampus IPB Darmaga, Bogor
40	Nurheni Sri Palupi, Dr.	SEAFast Center - IPB	Jl. Puspa No 1 Lingkar Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
41	Nuri Andarwulan, Dr.	SEAFast Center - IPB	Jl. Puspa No 1 Lingkar Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
42	Nurwitri	Departemen Ilmu Teknologi Pangan - IPB	Bogor
43	Purwiyatno Hariyadi, Dr.	SEAFast Center - IPB	Jl. Puspa No 1 Lingkar Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
44	Ratih Dewanti Hariyadi, Dr.	Departemen Ilmu Teknologi Pangan - IPB	Bogor
45	Reisi N, SP.	Departemen Gizi Masyarakat - IPB	Kampus IPB Darmaga, Bogor
46	Rindy	BATAN	Jakarta
47	Siti Madanjah, Dr.	SEAFast Center - IPB	Jl. Puspa No 1 Lingkar Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
48	Subarna, MS.	Departemen Ilmu Teknologi Pangan - IPB	Bogor

Prosiding *Focus Group Discussion* Kenaikan Harga BBM dan Pencapaian MDGs

No.	Nama	Instansi	Alamat
49	Sukarna, Dr.	Departemen Ilmu Teknologi Pangan - IPB	Kampus IPB Darmaga, Bogor
50	Sullantari, Dra., MS.	SEAFast Center - IPB	Jl. Puspa No 1 Lingkar Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
51	Susi	Pasca Sarjana Gizi Manusia, Departemen Gizi Masyarakat, FEMA	Bogor
52	Tien R. Muchtadi, Prof. Dr.	Departemen Ilmu Teknologi Pangan - IPB	Kampus IPB Darmaga, Bogor
53	Tiurma	Pasca Sarjana Gizi Manusia, Departemen Gizi Masyarakat, FEMA	Jakarta
54	Tri Susilowati, SE.	SEAFast Center - IPB	Jl. Puspa No 1 Lingkar Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
55	Uken Soetrisno, Dr.	Puslitbang Gizi dan Makanan	Jl. Semeru 63 Bogor
56	Virna B. Putri, STP.	SEAFast Center - IPB	Jl. Puspa No 1 Lingkar Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
57	Waluyo	Humas IPB	Kampus IPB Darmaga, Bogor
58	Winiati Puji Rahayu, Prof. Dr.	Departemen Ilmu Teknologi Pangan - IPB	Bogor
59	Yadi Haryadi, Dr.	Departemen Ilmu Teknologi Pangan - IPB	Bogor
60	Yayat Heriyatno, MPS.	Departemen Gizi Masyarakat - IPB	Kampus IPB Darmaga, Bogor
61	Yekti Widodo, Ir. MS.	Puslitbang Gizi dan Makanan	Jl. Semeru 63 Bogor
62	Yektiworo J.	Pasca Sarjana Gizi Manusia, Departemen Gizi Masyarakat, FEMA	Bogor
63	Zulaikhah, SP.	SEAFast Center - IPB	Jl. Puspa No 1 Lingkar Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680